



# **RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)**

**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA  
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN  
TAHUN 2023**



## 1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam proses pembangunan nasional. capaian kinerja makro Kabupaten Jayawijaya tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1.1**  
**Capaian Kinerja Makro Kabupaten Jayawijaya**  
**Tahun 2022-2023**

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	PERUBAHAN (%)
1	2	4	5	6
1	Indeks Pembangunan Manusia	63,85	64,81	-5,868
2	Angka Kemiskinan (Ribu Jiwa)	75,59	73,42	-2,871
3	Angka Pengangguran (Persen)	0,45	0,51	13,333
4	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	5,69	5,63	-1,054
5	Perdapatan Perkapita (Juta Rupiah)	33.309.990	36.504.218	9,589
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,386	0,319	-17,358

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Jayawijaya, Tahun 2023

## 2. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

### A. Urusan Pendidikan

#### 1) Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan pendidikan yang diperoleh oleh Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Capaian Outcome Urusan Pendidikan Tahun 2023**

URUSAN	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN DATA
2	3	4	5	6	7	8
PENDIDIKAN	1	Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )	$\frac{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD}}{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten /kota yang bersangkutan}} \times 100\%$	84,00%	DINAS PENDIDIKAN DAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD : 4.369 , Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten

URUSAN	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN DATA
2	3	4	5	6	7	8
						/kota yang bersangkutan : 5.201
	2	Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam pendidikan dasar	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di Sekolah Dasar}}{\text{Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten /kota yang bersangkutan}} \times 100\%$	125,361%	DINAS PENDIDIKAN	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di Sekolah Dasar : 24.740 , Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten /kota yang bersangkutan :19.735
	3	Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam pendidikan menengah pertama	$\frac{\text{Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di Sekolah Menengah Pertama}}{\text{Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kabupaten /kota yang bersangkutan}} \times 100\%$	57,08%	DINAS PENDIDIKAN	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di Sekolah Menengah Pertama 8.260 , Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kabupaten /kota yang bersangkutan : 14.469
	4	Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dalam pendidikan kesetaraan	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7-18 yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan}}{\text{Jumlah anak usia 7-18 yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten/kota yang bersangkutan}} \times 100\%$	10,48%	DINAS PENDIDIKAN	Jumlah anak usia 7-18 yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan : 5.198 , Jumlah anak usia 7-18 yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten/kota yang bersangkutan : 49.591

## 2) Realisasi Belanja Urusan Pendidikan

Realisasi belanja Urusan Pendidikan di Kabupaten Jayawijaya Tahun 2023 sebesar Rp. **126.685.878.717,-** dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Realisasi Anggaran Urusan Pendidikan, Program dan Jenis Belanja Kabupaten Jayawijaya Tahun 2023**

URAIAN (PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN)	PAGU	REALISASI
1	2	3
<b>URUSAN PENDIDIKAN (DINAS PENDIDIKAN)</b>	<b>290.871.140.597</b>	<b>126.685.878.717</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>132.470.302.139</b>	<b>57.364.566.303</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	75.000.000	44.523.161
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	55.000.000	44.523.161
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	-
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>130.969.685.139</b>	<b>56.221.156.442</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	130.954.685.139	56.206.156.442
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000	15.000.000
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>155.385.500</b>	<b>101.600.000</b>

URAIAN (PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN)	PAGU	REALISASI
1	2	3
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	155.385.500	101.600.000
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>264.319.500</b>	<b>115.286.700</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.995.000	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.325.000	-
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	79.999.500	49.999.500
Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000	29.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000	36.287.200
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>788.712.000</b>	<b>788.000.000</b>
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000	100.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	688.712.000	688.000.000
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>217.200.000</b>	<b>94.000.000</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	217.200.000	94.000.000
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>157.334.755.458</b>	<b>68.274.789.214</b>
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>61.924.255.000</b>	<b>17.278.628.300</b>
Pembangunan Ruang Kelas Baru	2.260.000.000	2.253.500.000
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	559.650.000	557.420.000
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	981.153.000	976.936.000
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	627.778.000	625.416.000
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.705.183.000	1.697.874.000
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	1.080.000.000	1.078.030.000
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	2.500.000.000	2.500.000.000
Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	690.467.000	690.458.000
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	70.000.000	42.700.000
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	500.000.000	263.123.300
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	8.190.000.000	3.918.000.000
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	150.000.000	0
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	39.929.800.000	0
Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	2.680.224.000	2.675.171.000
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>27.488.080.300</b>	<b>10.893.291.000</b>
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.379.435.000	1.378.334.000
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	2.569.500.000	2.567.531.000

URAIAN (PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN)	PAGU	REALISASI
1	2	3
Pembangunan Laboratorium	2.728.970.000	2.725.927.000
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	1.086.700.000	1.085.380.000
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	904.875.300	904.419.000
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	250.000.000	-
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1.000.000.000	1.000.000.000
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	745.000.000	745.000.000
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	50.000.000	36.700.000
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	450.000.000	450.000.000
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	100.000.000	0
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	16.223.600.000	0
<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	<b>8.106.981.000</b>	<b>4.728.117.914</b>
Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1.860.806.950	1.860.296.085
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	897.910.050	896.070.430
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	1.000.000.000	1.000.000.000
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	825.064.000	824.292.200
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	50.000.000	49.500.000
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	100.000.000	97.959.199
Pengelolaan Dana BOP PAUD	3.373.200.000	-
<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>3.029.600.000</b>	<b>523.800.000</b>
Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	540.000.000	523.800.000
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2.489.600.000	-
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	<b>56.785.839.158</b>	<b>34.850.952.000</b>
Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	3.954.977.158	3.946.105.000
Penambahan Ruang Kelas Baru	3.250.840.000	3.246.136.000
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	3.045.245.000	3.040.539.000
Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	1.797.680.000	1.793.959.000
Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	1.083.620.000	1.080.134.000
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.177.149.000	1.175.241.000
Pembangunan Asrama Sekolah	8.456.180.000	8.438.696.000
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.453.930.000	1.450.139.000

URAIAN (PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN)	PAGU	REALISASI
1	2	3
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	2.766.911.000	2.762.038.000
Rehabilitasi Asrama Sekolah	2.000.000.000	2.000.000.000
Pengadaan Mebel Sekolah	500.000.000	499.500.000
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	90.000.000	90.000.000
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	3.478.107.000	3.478.107.000
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	625.000.000	624.500.000
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	500.000.000	500.000.000
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	300.000.000	290.783.000
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	250.000.000	250.000.000
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	21.856.200.000	-
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	200.000.000	185.075.000
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	<b>276.083.000</b>	<b>256.523.200</b>
<b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar</b>	<b>276.083.000</b>	<b>256.523.200</b>
Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	276.083.000	256.523.200
<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>250.000.000</b>	<b>250.000.000</b>
<b>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>250.000.000</b>	<b>250.000.000</b>
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	150.000.000	150.000.000
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100.000.000	100.000.000
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA</b>	<b>540.000.000</b>	<b>540.000.000</b>
<b>Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>540.000.000</b>	<b>540.000.000</b>
Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten/Kota	540.000.000	540.000.000

### 3) Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Pendidikan di Kabupaten Jayawijaya Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a. Penerima Layanan Dasar

Permasalahan

Masih belum optimalnya pelayanan pendidikan bagi anak beerusia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun di Kabupaten Jayawijaya karena yang bersekolah pada PAUD Formal berjumlah 1576 peserta didik yang tertampung pada 40 satuan pendidikan PAUD. Dengan jumlah kampung 328 dan jumlah penduduk Jayawiajaya usia 5-6 sebanyak 2.957 orang. Dari sisi kualitas pelayanan lembaga, terdapat 22 Sekolah yang belum terakreditasi dan 33 sekolah belum terakreditasi.

Tindaklanjut

Melakukan penyebarluasan informasi tentang pentingnya pendidikan anak usia dini dengan membangun kerjasama dengan stakeholder yang terkait.

Mengusulkan alokasi dana dalam APBD dan Kerjasama dengan BP PAUD untuk Akreditasi TK/PAUD menggunakan dana APBN untuk Akreditasi 33 TK serta melakukan pentapan PAUD/TK Negeri

b. Pemenuhan Kelengkapan Dasar

Permasalahan

Belum oprimalnya dukungan pembiayaan dari anggaran PAUD yaitu, BOP Pusat sebesar Rp 2.238.000.000, dan dari program/kegiatan penyediaan biaya personil peserta didik PAUD sebesar Rp 2.025.000.000 atau total berjumlah Rp 4.263.000.000.

Tindaklanjut

Upaya menaikkan biaya penyelenggaraan Pendidikan dan menupayakan pemberdayaan peran serta masyarakat dalam pendidikan PAUD

c. Keadaan Rombongan Belajar (Rombel)

Permasalahan

Jumlah peserta didik PAUD sebanyak 1.576 anak dan anak usia 5-6 tahun tamat PAUD sebanyak 257 anak, dengan jumlah rombongan belajar atau kelas berjumlah 85 ruang. Ideal per rombel/kelas menampung 15 peserta didik. Rombel/kelas seharusnya yang dibutuhkan sebanyak 105 kelas, sehingga masih kekurangan 20 rombel/kelas.

Tindaklanjut

Upaya pemanfaatan rombel/kelas yang ada, serta perbaikan/rehabilitasi rombel/kelas yang rusak dan menambah rombel/kelas.

d. Pendidik

Permasalahan

Secara jumlah keseluruhan, kebutuhan pendidik sudah dapat terpenuhi. Tetapi Kurangnya jumlah guru ASN dan Tidak adanya pengangkatan guru PNS (Guru PAUD) yang dilakukan. Selain itu dari kompetensi dan kualifikasi, keadaannya masih harus ditingkatkan, dimana pendidik bersertifikat hanya 4 pendidik (3,81%) dan pendidik yang berkualifikasi  $\geq$  S-1 hanya 56 pendidik (53,33%).

Tindaklanjut

Merencanakan penetapan PAUD negeri, agar dapat terakomodasikan dalam penerimaan CPNS (bila ada) serta penambahan dana untuk kegiatan peningkatan Kompetensi dan kualifikasi.

e. Tenaga Kependidikan

Permasalahan

Dari sisi mutu dan jumlah, keberadaan tenaga kependidikan PAUD masih sangat terbatas, sehingga masih perlu terus ditingkatkan.

Tindaklanjut

Upaya peningkatan sumber daya tenaga kependidikan dengan membangun sinergitas dengan lembaga penyelenggara PAUD.

**B. Urusan Kesehatan**

1) Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Kesehatan yang diperoleh oleh Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Capaian Outcome Urusan Kesehatan Tahun 2023**

URUSAN	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN DATA
2	3	4	5	6	7	8
KESEHATAN	1	Mengukur rasio daya tampung Rumah Sakit rujukan	$\frac{\text{Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan}}{\text{Jumlah penduduk di kabupaten/kota}} \times 100\%$	0,75%	DINAS KESEHATAN	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan 208, Jumlah penduduk di kabupaten/kota = 275.289
	2	Mengukur tingkat rumah sakit rujukan di kabupaten/kota yang telah memiliki akreditasi	$\frac{\text{Jumlah RS rujukan yang terakreditasi}}{\text{Jumlah RS di kabupaten/kota}} \times 100\%$	100%	DINAS KESEHATAN	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi = 1. Jumlah RS di kabupaten/kota = 1
	3	Mengukur tingkat ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan}}{\text{Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota}} \times 100\%$	34,6%	DINAS KESEHATAN	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan = 1187. Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota = 3426



URUSAN	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN DATA
2	3	4	5	6	7	8
	4	Mengukur tingkat ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan}}{\text{Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota}} \times 100\%$	31,4%	DINAS KESEHATAN	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan = 824. Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota = 2625
	5	Mengukur persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	$\frac{\text{Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota}} \times 100\%$	29,7%	DINAS KESEHATAN	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 789. Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota = 2657
	6	Mengukur persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	$\frac{\text{Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah balita di kabupaten/kota}} \times 100\%$	51,1%	DINAS KESEHATAN	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 8851. Jumlah balita di kabupaten/kota = 17330
	7	Mengukur persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota}} \times 100\%$	52,7%	DINAS KESEHATAN	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 10420. Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota = 19735
	8	Mengukur persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota}} \times 100\%$	8,82%	DINAS KESEHATAN	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 18683. Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota = 211656
	9	Mengukur persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas di kabupaten/kota}} \times 100\%$	15,94%	DINAS KESEHATAN	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 3454. Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kabupaten/kota = 21666
	10	Mengukur persentase penderita hipertensi berusia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota}} \times 100\%$	13,83%	DINAS KESEHATAN	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 2796. Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota = 20205
	11	Mengukur persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah penderita DM yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita DM di kabupaten/kota}} \times 100\%$	9,61%	DINAS KESEHATAN	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 709. Jumlah penderita DM di kabupaten/kota = 7374
	12	Mengukur persentase penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota}} \times 100\%$	28,94%	DINAS KESEHATAN	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 88. Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota = 304
	13	Mengukur persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota}} \times 100\%$	98,98%	DINAS KESEHATAN	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 973. Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota = 983
	14	Mengukur persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV ( pelayanan kesehatan HIV ) sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar}}{\text{Jumlah Orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota}} \times 100\%$	88,02%	DINAS KESEHATAN	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar = 5540. Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota = 6294

## 2) Realisasi Belanja Urusan Kesehatan

Realisasi belanja Urusan Kesehatan di Kabupaten Jayawijaya Tahun 2023 sebesar Rp. **296.026.705.587,-** dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Realisasi Anggaran Urusan Kesehatan, Program dan Jenis Belanja**  
**Kabupaten Jayawijaya Tahun 2023**

URAIAN (PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN)	PAGU	REALISASI
1	2	3
<b>URUSAN KESEHATAN (DINAS KESEHATAN)</b>	<b>411.291.046.442</b>	<b>296.026.705.587</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>296.510.498.297</b>	<b>296.026.705.587</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>91.642.871.803</b>	<b>43.996.583.826</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000	9.550.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	-
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	-
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>10.000.000</b>	<b>9.550.000</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	88.432.661.803	38.234.933.381
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	88.412.661.803	38.224.933.381
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.000.000	-
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	258.176.614	258.176.614
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>258.176.614</b>	<b>258.176.614</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	527.355.000	474.781.522
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.560.000	-
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.750.000	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.150.000	25.150.000
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>474.895.000</b>	<b>449.631.522</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	810.000.000	808.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	810.000.000	808.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>922.455.000</b>	<b>2.128.817.339</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	175.725.000	8.500.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	113.130.000	517.917.339
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	633.600.000	1.602.400.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	320.400.000	1.916.324.541
<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>43.400.000</b>	<b>103.540.000</b>
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	549.975.541	549.975.541
<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>985.809.000</b>	<b>985.809.000</b>
<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>277.000.000</b>	<b>277.000.000</b>
Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	600.000.000	166.000.429
Pembangunan Puskesmas	600.000.000	166.000.429
Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	195.935.137.994	246.548.063.467
Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	145.183.415.210	197.676.851.381

URAIAN (PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN)	PAGU	REALISASI
1	2	3
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	29.866.418.919	48.212.893.618
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	80.519.250.000	80.068.434.500
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	11.555.600.000	11.535.545.000
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	151.553.422	151.550.000
Pengadaan Obat, Vaksin	2.686.802.000	2.599.800.000
Pengadaan Bahan Habis Pakai	6.602.199.337	6.495.000.000
Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	6.789.051.606	25.295.758.693
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	199.537.875	199.537.875
<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	2.950.649.914	8.838.672.071
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	3.296.325.012	13.388.843.084
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	376.860.000	102.328.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	388.705.000	788.488.540
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	50.751.722.784	48.871.212.086
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	659.640.000	140.680.000
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	1.000.000.000	1.000.000.000
Operasional Pelayanan Puskesmas	2.834.930.000	4.288.726.500
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	1.940.266.500	968.905.000
<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>25.190.075.778</b>	<b>41.439.065.839</b>
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	349.922.378	349.922.378
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	18.334.618.506	-
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	792.192.000	683.912.369
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.772.348.500	5.390.504.294
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>5.866.400.000</b>	<b>4.277.056.308</b>
<b>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>5.866.400.000</b>	<b>4.277.056.308</b>
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	2.905.948.500	1.113.447.986
<b>Rumah Sakit Umum Daerah Wamena</b>	<b>2.905.948.500</b>	<b>1.113.447.986</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>160.140.000</b>	<b>91.554.000</b>
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>160.140.000</b>	<b>91.554.000</b>
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	160.140.000	91.554.000
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>114.780.548.145</b>	<b>-</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.169.790.490	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	354.610.000	-
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	354.610.000	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.051.382.350	-

URAIAN (PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN)	PAGU	REALISASI
1	2	3
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>43.975.000</b>	-
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.512.080.000	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	278.477.350	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	216.850.000	-
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3.541.720.140</b>	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.500.000	-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	863.820.140	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.673.400.000	-
<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>1.985.148.000</b>	-
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	203.140.000	-
<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>550.000.000</b>	-
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.232.008.000	-
Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	236.930.000	-
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	236.930.000	-
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	104.276.757.655	-
Pengadaan Obat, Vaksin	58.436.437.974	-
Pengadaan Bahan Habis Pakai	21.777.822.803	-
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	19.852.411.322	-
<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>199.705.710</b>	-
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5.945.657.918	-
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	10.260.840.221	-
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	400.000.000	-
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	45.840.319.681	-
<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>5.278.799.939</b>	-
<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>39.882.458.742</b>	-
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	350.000.000	-

### 3) Permasalahn Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Kesehatan di Kabupaten Jayawijaya Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

#### a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Kendala :



- Masih adanya ibu hamil yang belum memiliki kartu identitas maupun identitas diluar jayawijaya
- Petugas Puskesmas masih mengabaikan pelayanan standart pemeriksaan kehamilan yaitu 10 T.
- Rendahnya koordinasi di daerah juga menjadi kendala yang dihadapi dalam penanganan pelayanan kesehatan pada ibu hamil
- Sebagian tenaga kesehatan tidak tinggal di tempat tugas
- Logistik yang kurang seperti, alat ukur HB meter
- Kurangnya tenaga bidan
- Sebagian besar penduduk merupakan penduduk transmigran (berdomisili sementara) di kota Wamena; kurangnya sosialisasi tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan
- Geografis / jangkauan sulit bagi ibu hamil askes/faskes
- Kurangnya dukungan aparat pemerintah desa dan kecamatan juga ikut menyumbang tingginya kasus kematian ibu di Kabupaten Jayawijaya. Hal ini bisa disiasati dengan melibatkan aparat desa dan kecamatan dalam program penurunan AKI dan AK.

Tindak lanjut :

- Perlu sosialisasi lebih intens tentang definisi operasional tentang pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai dengan standart yang ada dalam SPM
- Pemberdayaan masyarakat dalam konteks kampung siaga perlu terus digalakkan agar permasalahan kesehatan yang timbul di masyarakat dapat sedini mungkin terdeteksi dan teratasi dengan baik
- Menyediakan bahan kontak bagi ibu yang bersalin di fasilitas Kesehatan
- Pendataan masyarakat;kunjungan rumah;kerja sama dengan kader,aparat setempat
- Penambahan Kelas pada ibu hamil pada kegiatan BOK

#### b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Kendala :

- Tidak semua ibu hamil mau bersalin di fasilitas kesehatan
- Kurangnya Sosialisasi mengenai pentingnya persalinan di fasilitas kesehatan
- Kebanyakan nakes tidak tinggal di tempat tugas
- Kurangnya tenaga bidan di desa

- Kurangnya Bidan KIT dan tidak layak pakai
- Masih adanya ibu bersalin yang memilih melahirkan di honai atau pun dibantu persalinan oleh non-nakes sehingga beresiko terjadinya komplikasi pasca persalinan
- Sarana dan prasana yang kurang memadai di puskesmas sehingga pelayanan bagi ibu bersalin di fasyankes tidak berjalan dengan baik. Pelayanan yang dapat diberikan hanya berupa kunjungan rumah dan edukasi untuk merujuk ke RS saat masa persalinan.

Tindak Lanjut :

- Promosi kesehatan agar ibu mau bersalin di faskes
- Menyediakan bahan kontak bagi ibu lulus K4.
- Menjalankan Stiker P4 K.
- Penempatan bidan di puskesmas dan kampung yang tidak ada tenaga bidan
- Pengadaan bidan KIT untuk seluruh bidan
- Sosialisasi saat linsek
- Pelatihan APN bagi tenaga bidan

#### c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Kendala

- Tidak semua ibu hamil , bersalin di fasilitas kesehatan, sehingga tidak dilakukan perawatan pada BBL
- Askes ke faskes yang sulit/ geografis
- Kurangnya sosialisasi ke masyarakat
- Kurangnya tenaga bidan
- Bidan KIT tidak layak pakai
- Mengedukasi masyarakat yang di mulai saat kehamilan sehingga mau melakukan persalinan di Puskesmas dan di bantu oleh tenaga Kesehatan
- Konseling waktu ANC, kemitraan bidan kader, penempelan Stiker P4K, alokasi dana khusus untuk transport ibu supaya bisa melahirkan di fasyankes
- Meningkatkan kerjasama lintas sektor, meningkatkan sosialisasi tentang kesehatan ibu Bersalin

Tindak Lanjut

- Sosialisasi pentingnya kunjungan bayi baru lahir untuk mendapatkan pelayanan sesuai standar

- Penempatan bidan di puskesmas dan kampung yang tidak ad tenaga bidan
- Pengadaan bidan KIT untuk seluruh bidan
- Membangun kemitraan dengan kader

#### d. Pelayanan Anak Balita

##### Kendala

- Rendahnya kesadaran masyarakat membawa anak ke posyandu
- Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya imunisasi
- Masih ada kampung yang belum ada posyandu
- Faktor keamanan
- Kapasitas Staff yang belum memenuhi secara merata disetiap TIM
- Banyak masyarakat yang tidak membawa Kembali balitanya ke posyandu setelah mendapatkan imunisasi lengkap

##### Tindak lanjutt

- Promosi kesehatan / sosialisasi mengenai pentingnya posyandu
- Meningkatkan lintas sektor, melakukan sosialisasi pentingnya membawa balita ke posyandu
- Membangun kemitraan dengan PKK kampung, kader
- Pengadaan PMT penyuluhan di setiap posyandu per bulan
- Menggerakkan Masyarakat
- Sosialisasi mengenai pentingnya Imunisasi
- Bekerjasama dengan tomas, toga untuk membangun kepercayaan masyarakat
- Penambahan Kelas pada balita di kegiatan BOK
- Kunjungan rumah, kemitraan gizi-kader, kunjungan ulang pasca posyandu

#### e. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

##### Kendala

- Belum semua puskesmas melakukan kegiatan penjarigan kesehatan anak sekolah
- Kurangnya staff yang memadai untuk melakukan kegiatan ini di setiap sekolah pada wilayah layanan puskesmas.
- Belum semua nakes dilatih penjarkes
- Belum semua puskesmas memasukkan laporan Penjarkes

- Kurangnya tenaga nakes yang ada di beberapa puskesmas untuk membuat laporan penjarkes
- Banyak Anak sekolah kabur saat mengetahui adanya pemeriksaan kesehatan

#### Tindak Lanjut

- Pendampingan tehknis untuk tenaga Kesehatan sebagai penanggung jawab program untuk memastikan mampu merencanakan dan melakukan sesuai yng direncanakan serta membantu memfasilitasi alat dan bahan pelayanan.
- Sosialisasi dan edukasi mengenai penjarkes
- Membangun Koordinasi lintas sektor dan lintas program
- Pelatihan penjarkes bagi nakes
- Mendorong puskesmas yang belum melaksanakan penjarkes
- Kunjungan ulang untuk anak-anak yang tidak datang ke sekolah,

#### f. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

##### Kendala

- Belum semua puskesmas melaksanakan posyandu Lansia
- Belum semua puskesmas memiliki tenaga dokter
- Belum ada puskesmas santun Lansia
- Belum semua naks dilatih pelayanan lansia

##### Tindak Lanjut

- Membuka posyandu lansia di setiap kampung
- Melatih nakes untuk mendukung pelayanan lansia
- Mendorong puskesmas melaksanakan puskesmas santun lansia
- Kurangnya tenaga nakes di beberapa puskesmas unuk membuat laporan lansia
- Rutin melakukan pertemuan lintas sektor; meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan lintas program sehingga terlajin kerjasama dalam pelaksanaan skrening kesehtan usia lanjut.

#### g. Pelayanan Kesehatan pada penderita Hipertensi

##### Kendala

- Sebagian besar SDM di Puskesmas belum terlatih dalam program PTM
- Sarana dan prasarana penunjang pemeriksaan masih kurang dan rusak

##### Tindak Lanjut

- OJT puskesmas tentang pemeriksaan hipetensi,



- Melakukan pertemuan bulanan untuk merangsang puskesmas melakukan pelaporan

- Membuat SK TIM PTM

#### h. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus

##### Kendala

- Sebagian besar SDM di Puskesmas belum terlatih dalam program PTM

- Belum terkalibrasinya alat pemeriksaan diabetes

- Ketidaksesuaian alat pemeriksaan dengan stik pemeriksaan sehingga tidak akurat hasilnya

##### Tindak Lanjut

- OJT puskesmas tentang pemeriksaan DM

- Melakukan pertemuan bulanan untuk merangsang puskesmas melakukan pelaporan

- Membuat SK TIM PTM

#### i. Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa

##### Kendala

- Sebagian besar SDM di Puskesmas belum terlatih dalam program kesehatan jiwa

- Tidak ada tenaga khusus kesehatan jiwa

- Hanya ada layanan polik penyakit jiwa di RS Wamena dan belum ada ruangan perawatan penyakit jiwa

- Kesadaran dari stakeholder terhadap masalah gangguan jiwa di wilayah kerja belum ada

##### Tindak Lanjut

- OJT puskesmas tentang pemeriksaan ODGJ usia produktif

- Melakukan pertemuan bulanan untuk merangsang puskesmas melakukan pelaporan

- Membuat SK TIM PTM

#### j. Pelayanan kesehatan Orang Dengan Tuberculosis (TB)

##### Kendala

- Kendalanya masyarakat tidak membawa pot yang diberikan untuk menampung dahak ke puskesmas

- Jumlah pasien Tersangka TB dan Pasien terkonfirmasi TB yang semakin meningkat di wilayah kerja

- Belum semua data TB direkap oleh puskesmas dikarenakan jaringan internet yang tidak baik
- Belum ada keterlibatan aktif dari tokoh masyarakat pemangku kepentingan di distrik pelebaga dalam Program TB,HIV, Tidak ada Kader TB/HIV yang membantu, alamat pasien yang berpindah-pindah, pasien banyak yang menggunakan identitas orang lain, adanya stigma di Masyarakat

#### Tindak Lanjut

- Pertemuan data bulanan di dinas kesehatan untuk mengiput dta yang tidak terimput di puskesmas karna jaringan, Penelusuran data pasien di puskesmas untuk mencari data pasien yang tidak terimput di layanan
- Rutin melakukan pertemuan lintas sektor; meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan lintas program sehingga terlajin Kerjasama

#### k. Pelayanan Kesehatan orang dengan Risiko terinfeksi HIV

##### Kendala

- Angka kasus putus berobat yang masi sangat tinggi
- Logistik Yang sempit terjadi kekosongan
- Jaringan Internet yang jelek sehingga menghambat pelaporan

##### Tindak lanjut

- Pelacakan kasus mangkir berobat dilayanan
- Pendampingan pasien Oleh LSM
- OJT konseling HIV ke puskesmas Untuk meningkatkan kepatuhan minum obat pada pasien HIV

### C. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

#### 1) Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diperoleh oleh Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.5**  
**Capaian Outcome Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023**

URUSAN	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN DATA
2	3	4	5	6	7	8
PEKERJAAN UMUM	1	Mengukur luas kawasan permukiman rawan	<i>Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian</i>	-	DINAS PU	Belum Adanya Dokumen dan Kajian terhadap hal tersebut

URUSAN	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN DATA
2	3	4	5	6	7	8
		banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kab/kota	$\frac{\text{banjir di WS kewenangan kab/kota ( ha )}}{\text{Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kab/kota ( ha )}} \times 100\%$			
	2	Mengukur rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab/kota	$\frac{\text{luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab/kota ( m )}}{\text{luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS kewenangan kab/kota ( m )}} \times 100\%$	-	DINAS PU	Belum Adanya Dokumen dan Kajian terhadap hal tersebut
	3	Mengukur rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	$\frac{\text{Luas irigasi kewenangan kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun ( ha ), ditingkatkan ( ha ), direhabilitasi ( ha ), dioperasikan dipelihara ( ha )}}{\text{Luas daerah irigasi kewenangan kab/kota}} \times 100\%$	59,078%	DINAS PU	Luas irigasi kewenangan kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun ( ha ), ditingkatkan ( ha ), direhabilitasi ( ha ), dioperasikan dipelihara ( ha ) 1.920,2 Ha , Luas daerah irigasi kewenangan kab/kota 3.250,23 Ha
	4	Mengukur persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota}}{\text{Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut}} \times 100\%$	59,74%	DINAS PU	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani SPAM JP 23,864 KK, SPAM BJP 14,945 KK , Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut 64,962 KK
	5	Mengukur persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	$\frac{\text{Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dsan air limbahnya diolah di IPALD}}{\text{Jumlah rumah di kabupaten/kota}} \times 100\%$	37,05%	DINAS PU	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT 18,629 KK + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dsan air limbahnya diolah di IPALD 5,440 KK, Jumlah rumah di kabupaten/kota 64,962 KK
	6	Mengukur rasio kepatuhan IMB kab/kota	$\frac{\text{Jumlah pemanfaatan persetujuan bangunan Gedung yang sesuai peruntukannya}}{\text{Jumlah persetujuan bangunan geduung yang berlaku}} \times 100\%$	17 IMB	DINAS PU	Jumlah pemanfaatan persetujuan bangunan Gedung yang sesuai peruntukannya 17 Data IMB, Jumlah persetujuan bangunan gedung yang berlaku 17 Data IMB
	7	Mengukur tingkat kemantapan jalan	$\frac{\text{Panjang jalan kewenangan kabupaten/kota yang mantap}}{\text{Panjang jalan keseluruhan di wilayah Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	28,70%	DINAS PU	Panjang jalan kewenangan kabupaten/kota yang mantap 92,273 Km , Panjang jalan keseluruhan di wilayah Kabupaten/Kota 321,461 Km
	8	Mengukur rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis}}{\text{Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah kabupaten/kota}} \times 100\%$	-	DINAS PU	Tidak adanya kegiatan untuk mendata
	9	Mengukur rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	$\frac{\text{Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi}}{\text{Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya}} \times 100\%$	-	DINAS PU	Tidak adanya kegiatan untuk mendata

## 2) Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Realisasi belanja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Jayawijaya Tahun 2023 sebesar Rp. **118.501.943.364,-** dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

**Tabel 2.6**  
**Realisasi Anggaran Urusan Pekerjaan Umum, Program dan Jenis Belanja**  
**Kabupaten Jayawijaya Tahun 2023**

<b>URAIAN (PROGRAM, KEGIATAN &amp; SUB KEGIATAN)</b>	<b>PAGU</b>	<b>REALISASI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	<b>159.533.209.855</b>	<b>118.501.943.364</b>
<b>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>159.533.209.855</b>	<b>118.501.943.364</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.947.923.778</b>	<b>2.285.169.559</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.000.000	26.097.500
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000	10.425.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.000.000	4.762.500
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	10.910.000
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5.046.312.778</b>	<b>1.862.847.645</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.026.312.778	1.857.622.645
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	20.000.000	5.225.000
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>52.586.000</b>	<b>-</b>
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	52.586.000	-
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>494.401.000</b>	<b>295.224.414</b>
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64.251.000	48.951.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.950.000	-
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.505.000	5.955.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	357.695.000	240.318.414
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>32.224.000</b>	<b>-</b>
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.224.000	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	242.400.000	101.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	242.400.000	101.000.000
<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>2.138.590.650</b>	<b>1.817.820.000</b>
<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.238.590.650</b>	<b>928.950.000</b>
Normalisasi/Restorasi Sungai	1.238.590.650	928.950.000
<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>900.000.000</b>	<b>888.870.000</b>
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	400.000.000	395.000.000
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	500.000.000	493.870.000



URAIAN (PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN)	PAGU	REALISASI
1	2	3
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>1.892.325.000</b>
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	2.000.000.000	1.892.325.000
Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	2.000.000.000	1.892.325.000
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>999.975.000</b>
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000.000	999.975.000
Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	1.000.000.000	999.975.000
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	<b>500.000.000</b>	<b>499.898.000</b>
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000	499.898.000
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	500.000.000	499.898.000
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>146.446.695.427</b>	<b>109.509.071.805</b>
<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>146.446.695.427</b>	<b>109.509.071.805</b>
Pembangunan Jalan	46.764.981.026	45.015.453.000
Rekonstruksi Jalan	95.131.963.601	61.860.379.500
Pembangunan Jembatan	4.549.750.800	2.633.239.305
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>1.497.684.000</b>
<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>1.497.684.000</b>
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1.500.000.000	1.497.684.000

### 3) Permasalahn Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Jayawijaya Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

#### a. Permasalahan

Kendala, permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik eksternal maupun internal antara lain :

- Terbatasnya dana pemerintah daerah untuk melaksanakan penerapan SPM (Pengumpulan Data, Penghitungan Kebutuhan, Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Pemenuhan ), dengan kondisi wilayah Kabupaten Jayawijaya yang luas dan permukimannya tersebar sehingga

mempengaruhi nilai investasi/penganggaran dengan layanan yang diberikan.

- Kemampuan SDM masyarakat yang masih tidak merata akan pentingnya penerapan SPM.
- Pemahaman OPD yang terbatas terkait kebijakan SPM Bidang Pekerjaan Umum terutama penerapannya pada tahap pengumpulan data dan perhitungan
- kebutuhan. Kondisi PDAM Kabupaten Jayawijaya yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, sangat mempengaruhi penerapan SPM.

**b. Solusi dan Saran**

Langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh dalam penerapan dan pencapaian SPM antara lain :

- Lebih mengupayakan agar juga bisa mendapatkan dana yang bersumber selain dari APBD yang antara lain dari APBN dan/atau APBD Provinsi, kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), serta penyertaan modal pemerintah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
- Meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya penerapan SPM dengan sosialisasi dari narasumber yang kompeten misalnya dari Dinas Kesehatan dan juga dari pemuka agama/tokoh masyarakat, kepala suku dan kepala desa;
- Meningkatkan pemahaman OPD terkait kebijakan SPM bidang Pekerjaan Umum misalnya sosialisasi dan pelatihan;
- Mendorong adanya dukungan pembiayaan kebijakan SPM;

**D. Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman**

**1) Capaian Kinerja Outcome**

Capaian kinerja urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang diperoleh oleh Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.7**  
**Capaian Outcome Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tahun 2023**

URUSAN	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN DATA
2	3	4	5	6	7	8
PERUMAHAN	1	Mengukur capaian kinerja penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban	$\frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun } n}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan di tangani pada tahun } n} \times 100\%$	-	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN	Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten tidak dilaksanakan pada tahun 2023 karena tidak terjadi bencana

URUSAN	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN DATA
2	3	4	5	6	7	8
		bencana kabupaten/kota			PEMUKIMAN	alam di Kabupaten Jayawijaya pada tahun sebelumnya.
	2	Mengukur capaian kinerja fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	$\frac{\text{Rumah tangga penerima fasilitas penggantian hak atas penguasaan tanah dan atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni}}{\text{Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan}} \times 100\%$	-	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Fasilitasi penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat terdampak relokasi Program Pemerintah Kabupaten, tidak dilaksanakan pada tahun 2023 karena tidak ada Program Relokasi Rumah Layak Huni bagi Masyarakat di Kabupaten Jayawijaya pada tahun sebelumnya.
	3	Mengukur persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)}}{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha}} \times 100\%$	0,106%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha): 0,0936 ha. Luas Kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha: 87,93 ha.
	4	Mengukur penurunan jumlah unit RTLH (rumah tidak layak huni)	$\frac{\text{Jumlah unit rumah tidak layak huni}}{\text{Jumlah total unit rumah kabupaten/kota}} \times 100\%$	89,09%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Jumlah unit rumah tidak layak huni, 43.758 unit. Jumlah total unit rumah. 49.118 unit.
	5	Mengukur persentase unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	$\frac{\text{Jumlah unit rumah yang sedang di bangun terfasilitasi PSU}}{\text{Jumlah unit rumah kab/kota}} \times 100\%$	-	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Tidak ada unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU di Tahun 2023  *telah di usulkan pada program kegiatan tetapi tidak adanya pendanaan untuk kegiatan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)

## 2) Realisasi Belanja Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Realisasi belanja Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman di Kabupaten Jayawijaya Tahun 2023 sebesar Rp. **11.272.012.570,-** dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

**Tabel 2.8**  
**Realisasi Anggaran Urusan Perumahan, Program dan Jenis Belanja Kabupaten Jayawijaya Tahun 2023**

URAIAN (PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN)	PAGU	REALISASI
1	2	3
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>13.530.911.894</b>	<b>11.272.012.570</b>
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	13.530.911.894	11.272.012.570
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.016.811.344</b>	<b>1.856.939.970</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.000.000	-
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.000.000	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.000.000	-
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.278.759.444</b>	<b>1.573.171.569</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.278.759.444	1.573.171.569

URAIAN (PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN)	PAGU	REALISASI
1	2	3
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>46.300.000</b>	<b>46.300.000</b>
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	46.300.000	46.300.000
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>15.000.000</b>	<b>4.687.000</b>
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	15.000.000	4.687.000
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>402.696.400</b>	<b>181.081.398</b>
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000	-
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.000.000	14.072.500
Penyediaan Bahan/Material	7.498.400	2.890.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	355.198.000	164.118.898
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>14.394.000</b>	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.394.000	-
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>195.191.500</b>	<b>39.600.000</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	76.391.500	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	118.800.000	39.600.000
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>24.470.000</b>	<b>12.100.003</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.500.000	-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.970.000	12.100.003
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>46.600.000</b>	-
<b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>46.600.000</b>	-
Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	46.600.000	-
<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>9.467.500.550</b>	<b>9.415.072.600</b>
<b>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>	<b>50.020.000</b>	-
Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	50.020.000	-
<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>	<b>9.417.480.550</b>	<b>9.415.072.600</b>
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	161.750.000	161.750.000
Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	9.255.730.550	9.253.322.600

### 3) Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Jayawijaya Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a) Permasalahan
- Untuk penanganan bencana pemerintah daerah memberikan wewenang ini kepada BPBD sehingga Data SPM terkait Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/kota
  - Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan menata dilingkungannya
- b) Solusi
- Diharapkan agar hal terkait Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana daerah Kabupaten Jayawijaya diarahkan ke BPBD Jayawijaya selaku *Leading Sector* untuk penanganan bencana daerah.
  - Melakukan sosialisasi agar selalu menjaga dan menata lingkungan perumahan

## E. Urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat

### 1) Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat yang diperoleh oleh Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.9**  
**Capaian Outcome Urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023**

URUSAN	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN DATA
2	3	4	5	6	7	8
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1	Mengukur capaian kinerja penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang di tangani}}{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100\%$	77,77%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Jumlah Pengaduan yang ditangani 49, Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk 63 Pengaduan
	2	Mengukur persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	$\frac{\text{Jumlah perda/perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah keseluruhan perda dan perkada yang memuat sanksi}} \times 100\%$	100%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Jumlah perda/perkada yang ditegakkan 11, Jumlah keseluruhan perda dan perkada yang memuat sanksi 11
	3	Mengukur jangkauan layanan informasi rawan bencana	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana}}{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang di tetapkan}} \times 100\%$	-	BPBD	Kurang adanya dukungan biaya sehingga layanan informasi rawan bencana terhadap masyarakat yang berada di kawasan bencana tidak dilakukan
	4	Mengukur jangkauan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana}}{\text{Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana}} \times 100\%$	-	BPBD	Kurang adanya dukungan biaya sehingga layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap masyarakat yang berada di kawasan bencana tidak dilakukan
	5	Mengukur jangkauan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana}}{\text{Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana}} \times 100\%$	100%	BPBD	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana : 39.736 Jumlah warga negara yang

URUSAN	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN DATA
2	3	4	5	6	7	8
						menjadi korban bencana : 39.736
	6	Mengukur jangkauan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	<p><i>Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh dinas pemadaman kebakaran dan penyelamatan atau perangkat daerah + jumlah layanan pemadaman di kab kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan dinas pemadaman kebakaran dan pelayanan atau perangkat daerah</i></p> <p style="text-align: center;">————— X 100%</p> <p><i>Jumlah kesediaan kebakaran di kabupaten/kota</i></p>	93,33%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh dinas pemadaman kebakaran dan penyelamatan atau perangkat daerah + jumlah layanan pemadaman di kab kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan dinas pemadaman kebakaran dan pelayanan atau perangkat daerah 14 , Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota 15
	7	Mengukur rata-rata waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	<i>Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran</i>	10,26 Menit	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	154 Menit/15 Kasus

2) Realisasi Belanja Urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat  
Realisasi belanja Urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Jayawijaya Tahun 2023 sebesar Rp. **9.000.234.394,-** dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

**Tabel 2.10**  
**Realisasi Anggaran Urusan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Program dan Jenis Belanja Kabupaten Jayawijaya Tahun 2023**

URAIAN (PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN)	PAGU	REALISASI
1	2	3
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	<b>16.457.325.081</b>	<b>9.000.234.394</b>
<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>	<b>13.797.695.789</b>	<b>7.487.345.178</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>12.778.371.789</b>	<b>6.912.965.178</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	71.800.000	26.800.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000	-
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.800.000	26.800.000
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5.889.281.389</b>	<b>3.406.823.359</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.873.281.389	3.398.823.359
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.000.000	8.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8.000.000	-
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>447.785.000</b>	<b>196.168.334</b>



URAIAN (PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN)	PAGU	REALISASI
1	2	3
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.000.000	15.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	192.990.000	100.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	66.890.000	33.445.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	172.905.000	47.723.334
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000	30.000.000
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>6.009.505.400</b>	<b>3.027.173.485</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	97.000.000	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.997.400	6.998.485
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.900.508.000	3.020.175.000
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>330.000.000</b>	<b>226.000.000</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.000.000	96.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	130.000.000	130.000.000
<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>855.324.000</b>	<b>474.380.000</b>
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	805.324.000	474.380.000
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	704.924.000	373.980.000
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100.400.000	100.400.000
<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>50.000.000</b>	<b>-</b>
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	50.000.000	-
<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>164.000.000</b>	<b>100.000.000</b>
Pencegahan, Pengendalian, Pemdaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	164.000.000	100.000.000
Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	164.000.000	100.000.000
<b>BADAN PENANGGULANGAN BRNCANA DAERAH</b>	<b>2.659.629.292</b>	<b>1.512.889.216</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.959.629.292</b>	<b>814.159.216</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72.042.000	26.253.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	51.393.000	26.253.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.995.000	-

URAIAN (PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN)	PAGU	REALISASI
1	2	3
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.654.000	-
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.501.226.292</b>	<b>701.884.087</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.465.834.292	697.053.087
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.270.000	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	30.122.000	4.831.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	176.371.000	74.722.129
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.800.000	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.115.000	-
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.176.000	5.161.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	148.280.000	69.561.129
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>15.000.000</b>	<b>-</b>
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000	-
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>157.600.000</b>	<b>11.300.000</b>
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	157.600.000	11.300.000
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>37.390.000</b>	<b>-</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.130.000	-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.260.000	-
<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>700.000.000</b>	<b>698.730.000</b>
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	700.000.000	698.730.000
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	700.000.000	698.730.000
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	-
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	-	-

### 3) Permasalahn Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Jayawijaya Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

#### a. Permasalahan

- Belum adanya pemetaan daerah-daerah yang rawan bencana kebakaran dan belum adanya Peraturan Bupati tentang Manajemen Kebakaran di Kabupaten Jayawijaya. Sehingga pembagian WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) hanya terpusat pada Kota (Distrik Wamena Kota);

- Tidak adanya Hydran sumber air untuk pemadam kebakaran hanya berupa sumur penampungan air yang ada pada pos pemadam kebakaran sehingga tidak efektif dan efisiennya dalam penanganan kebakaran;
- Kurangnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang hanya memiliki 2 (dua) unit mobil pemadam kebakaran;
- Kurangnya tenaga terlatih yang ada pada pos pemadam kebakaran yang terlihat hanya 7 (tujuh) orang yang pernah mengikuti diklat pemadam kebakaran, itu pun hanya berupa diklat dasar;
- Kurang adanya dukungan dana yang menunjang kegiatan di lokasi rawan bencana;
- Tidak adanya satgas bencana yang ditempatkan di lokasi rawan bencana untuk memberi informasi tentang bencana yang terjadi di lokasi tersebut;
- Kurang adanya sarana dan prasarana penunjang kegiatan di lapangan;
- Kurang adanya pelatihan atau diklat kebencanaan yang diikuti oleh para ASN dilingkungan BPBD Kab.Jayawijaya sehingga kurang ada pemahaman tentang resiko bencana.

b. Solusi

- Perlu adanya Pemetaan daerah rawan bencana kebakaran, serta Peraturan Daerah tentang Manajemen Kebakaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya sehingga adanya penambahan beberapa Wilayah manajemen Kebakaran;
- Perlu adanya pembuatan sumur penampungan air di beberapa titik yang tersebar di WMK untuk menjadi sumber air bagi pemadam kebakaran;
- Perlu adanya pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran khususnya mobil pemadam kebakaran;
- Perlu adanya pelatihan bagi anggota pemadam kebakaran;
- Perlu adanya Pelatihan bagi Anggota BPBD;
- Menambah jumlah sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan dilapangan.

## F. Urusan Sosial

### 1) Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Sosial yang diperoleh oleh Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.11**  
**Capaian Outcome Urusan Sosial Tahun 2023**

URUSAN	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN DATA
2	3	4	5	6	7	8
SOSIAL	1	Mengukur persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pegemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	$\frac{\text{Jumlah penyandang disabilitas terlantar anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pegemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti}}{\text{Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pegemis}} \times 100\%$	100%	DINAS SOSIAL	Jumlah penyandang disabilitas terlantar anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pegemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 755, Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pegemis 755
	2	Mengukur persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran}}{\text{Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten kota}} \times 100\%$	-	DINAS SOSIAL	Dikarenakan pada tahun 2023 dinas sosial berfokus untuk menunjang program strategis nasional yaitu penghapusan kemiskinan ekstrem sehingga dinas sosial tidak mengalokasikan anggaran untuk program/kegiatan penanggulangan bencana daerah.

### 2) Realisasi Belanja Urusan Sosial

Realisasi belanja Urusan Sosial di Kabupaten Jayawijaya Tahun 2023 sebesar Rp. **10.295.106.414,-** dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

**Tabel 2.12**  
**Realisasi Anggaran Urusan Sosial, Program dan Jenis Belanja Kabupaten Jayawijaya Tahun 2023**

URAIAN (PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN)	PAGU	REALISASI
1	2	3
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>	<b>14.934.918.703</b>	<b>10.295.106.414</b>
<b>Dinas Sosial</b>	<b>14.934.918.703</b>	<b>10.295.106.414</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.995.518.703</b>	<b>1.427.406.414</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000	-
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	-
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.637.010.703</b>	<b>1.294.359.520</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.585.795.703	1.283.159.520

URAIAN (PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN)	PAGU	REALISASI
1	2	3
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	10.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	41.215.000	1.200.000
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>217.308.000</b>	<b>72.446.894</b>
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.040.000	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	177.268.000	72.446.894
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	121.200.000	60.600.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	121.200.000	60.600.000
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>4.939.400.000</b>	<b>1.867.700.000</b>
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	4.939.400.000	1.867.700.000
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	4.839.400.000	1.787.700.000
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000	80.000.000
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>7.000.000.000</b>	<b>7.000.000.000</b>
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	7.000.000.000	7.000.000.000
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	7.000.000.000	7.000.000.000

### 3) Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Sosial di Kabupaten Jayawijaya Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

#### a. Permasalahan

- Belum semua penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dapat tertangani
- Terkait hal-hal teknis pelayanan terhadap PMKS dimana SDM dan sarana prasarana kurang mendukung sehingga pelayanan tidak berjalan optimal

#### b. Solusi

- Meningkatkan koordinasi dengan instan terkait, lintas daerah dengan masalah penanganan PMKS
- Meningkatkan kualitas hidup PMKS melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan PMKS dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

- Perlunya pelatihan teknis terhadap PNS untuk peningkatan SDM serta ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dalam penanganan PMKS.

### 3. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

- A. Hasil evaluasi ELPPD tahun 2022 berdasarkan lampiran halaman 41 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 Tanggal 21 Desember 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional tahun 2023 berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun 2022 dengan hasil evaluasi sebagai berikut : **Kabupaten Jayawijaya Skor 1,6909 dengan Status Sangat Rendah.**
- B. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2022, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Papua Nomor : 06.A/LHP/XIX.JYP/05/2023 Tanggal 11 Mei 2023 berhasil mendapatkan **OPINI WTP**

### 4. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya (Unaudited) Tahun 2023 Realisasi Pendapatan Kabupaten Jayawijaya Tahun 2023 mencapai sebesar Rp. **1.655.931.938.908,25,-** dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2023 mencapai Rp. **1.740.809.578.948,-**.

Secara rinci, rincian realisasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2023 berdasarkan jenis pendapatan dan jenis belanja dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 4.1**  
**Laporan Realisasi APBD (Unaudited) Kabupaten Jayawijaya**  
**Tahun 2023 dan 2022**

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	1.746.785.466.152	1.655.931.938.908,25	94,80	1.546.194.574.180,55
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	101.896.595.526	80.280.307.184,25	78,79	66.599.491.172,55



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4.1.01	Pajak Daerah	14.960.848.192	17.533.842.906,00	117,20	18.046.528.804,00
4.1.02	Retribusi Daerah	66.152.527.598	46.426.809.265,00	70,18	36.144.163.513,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.087.767.529	2.995.133.078,00	97,00	3.087.767.529,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	17.695.452.207	13.324.521.935,25	75,30	9.321.031.326,55
	<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>101.896.595.526</b>	<b>80.280.307.184,25</b>	<b>78,79</b>	<b>66.599.491.172,55</b>
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.586.428.043.666</b>	<b>1.530.150.125.724,00</b>	<b>96,45</b>	<b>1.394.681.926.203,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.565.119.185.266	1.510.942.148.143,00	96,54	1.372.542.706.876,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.092.596.285.265	1.031.088.064.143,00	94,37	922.743.338.876,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	698.268.155.000	698.259.895.000,00	100,00	661.539.016.832,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	214.945.032.265	212.680.905.843,00	98,95	118.680.299.202,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	140.686.470.000	81.460.473.900,00	57,90	32.102.952.399,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1.092.596.285.265</b>	<b>1.031.088.064.143,00</b>	<b>94,37</b>	<b>922.743.338.876,00</b>
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	18.459.872.001	18.459.872.000,00	100,00	0,00
4.2.01.03	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur	191.465.907.000	191.465.907.000,00	100,00	186.185.014.000,00
4.2.01.03.01	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua	179.924.927.000	191.465.907.000,00	106,41	181.018.175.000,00
4.2.01.03.04	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua	11.540.980.000	0,00	0,00	5.166.839.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	262.597.121.000	269.928.305.000,00	102,79	263.614.354.000,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>	<b>472.522.900.001</b>	<b>479.854.084.000,00</b>	<b>101,55</b>	<b>449.799.368.000,00</b>
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	21.308.858.400	19.207.977.581,00	90,14	22.139.219.327,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	21.308.858.400	19.207.977.581,00	90,14	22.139.219.327,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	21.308.858.400	19.207.977.581,00	90,14	22.139.219.327,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH</b>	<b>21.308.858.400</b>	<b>19.207.977.581,00</b>	<b>90,14</b>	<b>22.139.219.327,00</b>
	<b>TOTAL PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.586.428.043.666</b>	<b>1.530.150.125.724,00</b>	<b>96,45</b>	<b>1.394.681.926.203,00</b>
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>58.460.826.960</b>	<b>45.501.506.000,00</b>	<b>77,83</b>	<b>84.913.156.805,00</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	43.096.281.399	30.528.070.626,00	70,84	43.705.473.516,00
4.3.01.02	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	20.000.000.000	0,00	0,00	0,00
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	0	23.096.281.399,00	0,00	43.705.473.516,00
4.3.01.05	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	23.096.281.399	7.431.789.227,00	32,18	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	15.364.545.561	14.973.435.374,00	97,45	41.207.683.289,00
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	0	0,00	0,00	28.632.952.455,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	15.364.545.561	14.973.435.374,00	97,45	12.574.730.834,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
	<b>JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>58.460.826.960</b>	<b>45.501.506.000,00</b>	<b>77,83</b>	<b>84.913.156.805,00</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.746.785.466.152</b>	<b>1.655.931.938.908,25</b>	<b>94,80</b>	<b>1.546.194.574.180,55</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.965.128.861.858</b>	<b>1.740.809.578.948,00</b>	<b>88,59</b>	<b>1.525.819.235.980,00</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.062.094.362.218</b>	<b>883.831.999.554,00</b>	<b>83,22</b>	<b>832.897.604.278,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	423.536.219.919	362.792.425.652,00	85,66	342.729.216.947,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	476.931.827.607	444.230.188.969,00	93,14	437.688.030.821,00
5.1.05	Belanja Hibah	132.562.329.692	53.650.892.578,00	40,47	32.295.002.650,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	29.063.985.000	23.158.492.355,00	79,68	20.185.353.860,00
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>1.062.094.362.218</b>	<b>883.831.999.554,00</b>	<b>83,22</b>	<b>832.897.604.278,00</b>
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>555.046.836.580</b>	<b>501.868.224.436,00</b>	<b>90,42</b>	<b>353.932.045.794,00</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	750.000.000	750.000.000,00	100,00	3.841.340.050,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	67.945.422.632	65.354.349.418,00	96,19	49.749.065.283,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	330.628.432.244	316.376.687.518,00	95,69	222.657.503.808,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	154.922.997.764	118.604.733.500,00	76,56	76.729.642.653,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	799.983.940	782.454.000,00	97,81	954.494.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>555.046.836.580</b>	<b>501.868.224.436,00</b>	<b>90,42</b>	<b>353.932.045.794,00</b>
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>10.465.484.000</b>	<b>10.255.991.898,00</b>	<b>98,00</b>	<b>3.861.073.750,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.465.484.000	10.255.991.898,00	98,00	3.861.073.750,00
	<b>JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>10.465.484.000</b>	<b>10.255.991.898,00</b>	<b>98,00</b>	<b>3.861.073.750,00</b>
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>337.522.179.060</b>	<b>344.853.363.060,00</b>	<b>102,17</b>	<b>335.128.512.158,00</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.228.579.760	1.228.579.760,00	100,00	1.228.579.760,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	336.293.599.300	343.624.783.300,00	102,18	333.899.932.398,00
	<b>JUMLAH BELANJA TRANSFER</b>	<b>337.522.179.060</b>	<b>344.853.363.060,00</b>	<b>102,17</b>	<b>335.128.512.158,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.965.128.861.858</b>	<b>1.740.809.578.948,00</b>	<b>88,59</b>	<b>1.525.819.235.980,00</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(218.343.395.705)</b>	<b>(84.877.640.039,75)</b>	<b>38,87</b>	<b>20.375.338.200,55</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>218.343.395.706</b>	<b>(2.805.000.000,00)</b>	<b>(1,28)</b>	<b>145.912.511.811,00</b>
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>226.148.395.706</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.912.511.811,00</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	226.148.395.706	0,00	0,00	145.912.511.811,00
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>226.148.395.706</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.912.511.811,00</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>7.805.000.000</b>	<b>2.805.000.000,00</b>	<b>35,94</b>	<b>0,00</b>
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000.000	0,00	0,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.805.000.000	2.805.000.000,00	100,00	0,00
	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>7.805.000.000</b>	<b>2.805.000.000,00</b>	<b>35,94</b>	<b>0,00</b>
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>218.343.395.706</b>	<b>(2.805.000.000,00)</b>	<b>(1,28)</b>	<b>145.912.511.811,00</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0</b>	<b>(87.682.640.039,75)</b>	<b>0,00</b>	<b>166.287.850.011,55</b>

## 5. INOVASI DAERAH

Berdasarkan Database Inovasi Daerah Kabupaten Jayawijaya memiliki inovasi daerah sebagai berikut :

**Gambar 5.1**  
**Jumlah dan Jenis Inovasi Kabupaten Jayawijaya**

No	OPD	Nama Inovasi	Tahapan Inovasi	Waktu Uji Coba Inovasi Daerah	Waktu Penerapan Inovasi Daerah	Kematangan	Keterangan
1	Bappeda	Sistem Informasi Kepegawaian	Uji Coba	1/1/2019	1/1/2020	0	
2	Nakerindag	"MAS LAYANG HANO" (Informasi Layanan Harga Bahan Pokok) MELALUI VIDIO TRONE DI KABUPATEN JAYAWIJAYA	Penerapan	1/1/2018	1/1/2019	0	
3	DP3AKB	Kampung KB Napua	Penerapan	2/9/2018	8/26/2019	97.00	
4	DP3AKB	Kampung KB Trikora	Penerapan	2/9/2018	8/26/2019	97.00	
5	DP3AKB	Kampung KB Wollo	Penerapan	2/9/2018	8/26/2019	97.00	
6	DP3AKB	Kampung KB Yalengga	Penerapan	2/9/2018	8/26/2019	97.00	
7	DP3AKB	Kampung KB Bolakme	Penerapan	2/9/2018	8/26/2019	97.00	
8	DP3AKB	Kampung KB Pelebaga	Penerapan	2/9/2018	8/26/2019	97.00	
9	DP3AKB	Kampung KB Hubikosi	Penerapan	2/9/2018	8/26/2019	97.00	
10	DP3AKB	Kampung KB Walelagama	Penerapan	2/9/2018	8/26/2019	97.00	
11	DP3AKB	Kampung KB Asolokobal	Penerapan	2/9/2018	8/26/2019	97.00	
12	DP3AKB	Kampung KB Musatfak	Penerapan	2/9/2018	8/26/2019	97.00	
13	DP3AKB	Kampung KB Kurulu	Penerapan	2/9/2018	8/26/2019	97.00	
14	DP3AKB	Kampung KB Asologaima	Penerapan	2/9/2018	8/26/2019	97.00	
15	DP3AKB	Kampung KB Wamena	Penerapan	2/9/2018	8/26/2019	97.00	
16	Dukcapil	Layanan Pindah Keluar Penduduk Jayawijaya Online	Penerapan	1/6/2020	4/20/2020	100.00	
17	Dukcapil	Layanan Akta Kelahiran Jayawijaya Online	Penerapan	1/6/2020	4/20/2020	100.00	
18	Dukcapil	Kartu Identitas Anak Jayawijaya Online	Penerapan	1/6/2020	4/20/2020	100.00	
19	Dukcapil	Lampid Jayawijaya	Penerapan	1/6/2020	4/20/2020	100.00	
20	Dukcapil	Admindak Harijan Jayawijaya	Penerapan	1/6/2020	4/20/2020	100.00	
21	Dukcapil	Statistik Kependudukan Jayawijaya	Penerapan	1/6/2020	4/20/2020	100.00	
22	Dukcapil	Pelayanan KK Online	Penerapan	1/6/2020	4/20/2020	97.00	
23	Kesbangpol	Pendaftaran Organisasi Masyarakat, LSM, dan Organisasi Profesi secara Online	Penerapan	6/12/2019	2/11/2020	39.00	
24	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sistim pendataan tanah aset Pemda Kabupaten Jayawijaya	Penerapan	8/26/2019	3/10/2020	39.00	
25	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sistim Pendataan Rumah Dinas	Penerapan	8/26/2019	3/10/2020	73.00	
26		PASAR TRADISIONAL C-19	Uji Coba	6/11/2020	6/11/2020	0.00	
27		PASAR MODERN C 19	Uji Coba	6/11/2020	6/11/2020	0.00	
28	PTSP	PTSP C -19	Uji Coba	6/11/2020	6/11/2020	0.00	
29	Dinas Perhubungan	TRANSPORTASI UMUM C -19	Uji Coba	6/11/2020	6/11/2020	0.00	
30	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	Inovasi Daerah Pencegahan Covid pada Sektor Restoran	Uji Coba	6/11/2020	6/7/2020	0	
31	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Pada Sektor Tempat Wisata	Inisiatif	6/5/2020	6/6/2020	0.00	
32	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	Inovasi Daerah pencegahan covid-19 pada sektor Hotel	Uji Coba	6/5/2020	6/5/2020	0.00	